ISSN:2622-5522 (p); 2622-5530 (e)
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi,
DOI: https://doi.org/10.24042/00202361755400

Perkembangan Urbanisasi Kota Padang Tempo Dulu

Nur Anisah Hasibuan*
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
nuranisahhsb7@gmail.com

Sudarman
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
sudarmanma@uinib.ac.ad

Lukmanul Hakim
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
lukmanulhakim@uinib.ac.id

Abstract
This research explores the evolution of Padang City urbanization in the historical period by applying an approach method involving heuristics (data collection process), source criticism, interpretation, and historiography (historical writing). The findings of this research indicate that the city of Padang, which is the center of West Sumatra, has an area of 694.96 km^2, dominated by the Minangkabau ethnic community, the majority of whom adhere to Islam. One of the structural characteristics of this city is its very strategic location facing the Indian Ocean and surrounded by the Bukit Barisan mountains. Simultaneously urban transformation is focused to the north and east of Kota Tua at the Batang Arau River Estuary. Since 1995, Padang City has developed into an economic center with the highest per capita income in West Sumatra. This article highlights the development of urbanization in Padang City in its history, which shaped it into a modern city since the 20th century, and emphasizes its role as an economic center in West Sumatra since ancient times.

Keywords: Urbanization, Padang City, Past Time, City Development.

Abstrak
Penelitian ini menggali evolusi urbanisasi Kota Padang pada periode sejarah dengan menerapkan metode pendekatan yang melibatkan heuristik (proses pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Kota Padang, yang merupakan pusat Sumatera Barat, memiliki luas wilayah 694,96 km^2, dikuasai oleh komunitas etnis Minangkabau yang mayoritas memeluk agama Islam. Salah satu ciri struktur kota ini adalah letaknya yang sangat strategis menghadap Samudera Hindia dan dikelilingi pegunungan Bukit Barisan. Secara simultan transformasi perkotaan terfokus ke utara dan sebelah timur Kota Tua di Muara Sungai Batang Arau. Sejak tahun 1995 Kota Padang berkembang menjadi pusat ekonomi dengan pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Artikel ini menyoroti perkembangan urbanisasi Kota Padang dalam sejarahnya, yang membentuknya menjadi kota modern sejak abad ke-20, serta menegaskan perannya sebagai pusat ekonomi di Sumatera Barat sejak zaman dahulu.

Kata Kunci: Urbanisasi, Kota Padang, Tempo Dulu

*Coresponding author
Submit: Juni 2023 Revised: December 2023 Accepted: December 2023 Published: December 2023

ملخص

استكشف هذا البحث تطور التحضر في مدينة بادانج في العصور التاريخية بتطبيق المنهج/ المدخل يتضمن على الاستدلال، ونقد المصدر، والتفسير، والتاريخ. أشارت نتائج هذا البحث إلى أنّ مدينة بادنج كمركز وعاصمة سومطرة الغربية ومساحتها 694، 96 كم ^{2}، يهيمن عليها مجتمع مينانجكابو الذين اعتنقوا الإسلام. ومن خصائصها الهيكلية هي أنّ هذه المدينة موقعها بإعدادات صغيرة حلوة توجه المحيط الهندي و تحيط بها جبال بوكيت باريسان. في وقت واحد، تركز التحول الحضري في شمال وشرق كوتا توا بالقرب من مصب نهر باتانج أراو. فقد استضافت مدينة بادانج منذ عام 1998 مركزا اقتصاديا مع الدخل الأعلى في سومطرة الغربية. و استكشف هذا البحث تطور التحضر في مدينة بادانج في تاريخها، الذي يجعلها مدينة حديثة منذ القرن العشرين، وكذلك التأكيد على دورها كمركز اقتصادي في سومطرة الغربية منذ فترة طويلة.

الكلمات المفاتيح : التحضر، مدينة بادانج، فترة طويلة.

Pendahuluan

Perkembangan kota dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini menjadi pendorong pertumbuhan dan perkembangan kota. Inovasi di berbagai bidang ilmu, sebagai contoh, memainkan peran kunci dalam membentuk wajah kota, terutama terlihat dalam pengembangan lingkungan dan infrastruktur kota.

Faktor alam juga memiliki kontribusi signifikan dalam evolusi kota. Kondisi geografis, struktur lahan, dan elemen-elemen alam lainnya memainkan peran penting dalam pembentukan karakteristik kota. Sejalan dengan perkembangan zaman, aspek sejarah juga turut memainkan peran krusial. Kenangan masa lalu membentuk dasar morfologi kota, dan pemahaman terhadap sejarah menjadi kunci untuk memahami transformasi kota dari waktu ke waktu.

Menurut Danisworo, bahwa bentuk kota bukan hanya hasil akhir, melainkan juga merupakan akumulasi fisik dari kehidupan non-fisik. Proses pembentukan kota dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa struktur fisik kota tidak hanya mencerminkan produk, tetapi juga merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma masyarakat pada masa pembentukannya.[1]

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diungkapkan bahwa Padang memiliki makna sebagai suatu dataran yang memiliki luas yang mencolok. Ciri alamnya tercermin dari adanya dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan, meskipun tidak mencapai ketinggian yang signifikan, tetap menyajikan keindahan. Sebagian wilayahnya langsung berbatasan dengan Samudera Hindia, menambahkan nuansa kealamian yang khas.

Beberapa daerah di Padang juga terletak dekat dengan pantai yang dikenal akan ombaknya yang energetik. Keberadaan dua sungai utama, yaitu Sungai Batang Arau dan Sungai Batang Kuranji, memiliki peranan yang sangat vital. Kedua sungai tersebut tidak hanya penting, melainkan juga cukup besar, memberikan sumbangan besar terhadap ekosistem dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Dengan demikian, kondisi alam sekitar secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat dan pola pemukimannya. Dalam konteks ini, tidak mungkin untuk memisahkan kehidupan masyarakat Padang dari keberadaan alam yang melingkupinya.[2]

---

[1] Amandos Jong Tallo, No TitleI dentifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen Di Kota Malang) Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen Di Kota Malang)," *Perencanaan Wilayah Dan Kota* Vol.25 (2014): 213–27.

[2] Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial* (Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2009).

Gambar 1
Panorama Kota Padang di sehiliran Batang Arau pada abad ke-19[3]

Kota Padang secara geografis terletak di tepi pantai Pesisir Barat Pulau Sumatera, sebagian besar mencapai ketinggian yang relatif rendah, yaitu di bawah 10 meter di atas permukaan laut. Wilayah kota ini mencakup garis pantai yang melibatkan Pulau Pisang sebagai elemen integral yang terdapat dalam batas administratif kota. Sejarah Kota Padang dapat diperinci ke dalam tiga periode berbeda. Pertama-tama, terdapat masa awal sebelum abad ke-17, yang menjadi babak awal pembentukan dan perkembangan kota ini. Selanjutnya, mengikuti masa kolonial yang mencakup rentang waktu dari abad ke-17 hingga abad ke-19, di mana pengaruh penjajahan turut membentuk dinamika kota. Terakhir, masa awal kemerdekaan yang dimulai dari abad ke-19 hingga saat ini, menggambarkan perkembangan lanjutan dan perubahan yang dialami Kota Padang seiring dengan berjalannya waktu.

Pada masa kerajaan Minangkabau di Pagaruyung, kota Padang telah memulai fase perkenalannya sebagai kampung pemukiman nelayan. Pada periode tersebut kerajaan Aceh sedang mengalami perkembangan pesat. Para pedagang dari Tiku dan Pariaman, sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh, seringkali singgah di Padang.

Pada awal abad ke-17, perusahaan VOC memulai kegiatan operasionalnya di Indonesia, memasuki Padang melalui jalur maritim Pulau Cingkuk. Beberapa tahun berlalu, VOC melibatkan diri dengan mendirikan loji strategis di sekitar wilayah daerah Batang Arau, yang kini dikenal sebagai wilayah yang makmur. Oleh karena itu, perkembangan daerah pemukiman ini meluas menjadi wilayah di Muara Padang. Pada masa itu, Belanda mulai menempatkan sejumlah pejabat administratif di daerah tersebut sambil membangun gudang-gudang sebagai tempat penyimpanan barang sebelum dikirimkan melalui pelabuhan Muara Padang. Dengan demikian, kehadiran VOC memberikan dorongan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta administratif di kawasan tersebut.

Selain Belanda, ada sejumlah pedagang Eropa juga berkunjung ke Padang. Di antara mereka terdapat perwakilan dari Inggris, Perancis, dan Portugis. Masyarakat Cina juga ambil bagian dalam perdagangan ini. Seiring pertumbuhan yang pesat, daerah ini tidak hanya dihuni oleh penduduk asli, melainkan juga sejumlah besar pendatang asing yang berkontribusi pada keragaman budaya dan ekonomi lokal. Dari semula sebagai perkampungan nelayan, Padang mengalami transformasi menjadi pelabuhan dagang internasional. Perubahan ini menciptakan keragaman budaya dan keragaman populasi yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan budaya.[4]

Guna memahami perkembangan kota secara holistik, maka diperlukan analisis mendalam terhadap setiap unsur yang turut membentuk struktur kota. Proses evolusi kota melibatkan transformasi pada masing-masing elemen, termasuk tata letak dan bentuk fisik kota. Kedua aspek ini, yang bersifat konkret, saling terkait dan terjadi pengaruh timbal balik antara perkembangan

[3] http://ekoalvaresz.blogspot.com/2008_06_01_archive.html, diakses pada 28 Oktober 2023.

[4] Mardanis, *Sejarah Kota Padang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987).

perkotaan dengan faktor-faktor non-fisik kota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor non-fisik berfungsi sebagai dasar bagi kemajuan kota.

Suatu kota mengalami pertumbuhan seiring jalan waktu. Kemajuan ini melibatkan berbagai aspek, seperti dimensi politik. Padang dapat dikategorikan sebagai kota yang relatif makmur dan canggih ditandai beragam kegiatan bisnis dan politik. Sumber-sumber kontemporer Belanda umumnya mengonfirmasi pandangan serupa, terutama perkembangan budaya, teknologi, ekonomi, dan infrastruktur fisik. [5] Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji pertumbuhan Kota Padang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) berupa eksplorasi komprehensif berbagai sumber pustaka, termasuk buku dan hasil kajian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian ini. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh landasan teoritis terkait isu-isu utama kajian ini.

Pendekatan spesifik penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan yakni pengumpulan sumber sejarah (heuristik), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan penulisan sejarah (historiografi).[6] Pendekatan ini dipilih untuk menyelidiki secara mendalam perkembangan urbanisasi Kota Padang pada masa lalu.

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Kajian ini melibatkan berbagai jenis literatur, jurnal ilmiah, serta publikasi dari instansi terkait yang membahas aspek-aspek perkembangan urbanisasi Kota Padang. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan gambaran yang terinci mengenai sejarah urbanisasi kota ini.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang terletak pada koordinat 100,22 Bujur Timur dan 0,56 Lintang Selatan. Wilayah kota ini dapat dikenali melalui batas-batas geografis: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, di sebelah dengan Kabupaten Pesisir Selatan, di sisi timur dengan Kabupaten Solok, dan di sebelah barat terbentang batas yang menjulur hingga Samudera Indonesia.

Gambar. 2
Peta wilayah kota Padang[7]

Kota Padang, salah satu Kotamadya di Provinsi Sumatera Barat, kini menonjol sebagai kota terluas di wilayah tersebut. Luasnya mencapai 629,63 kilo meter persegi. Secara administratif terdiri atas 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Menariknya, sebagian dari kecamatan tersebut masih

[5] Lamahoda, *Morfologi Kawasan Kota Lama Kupang,* (Tesis: Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2019).

[6] Saleh Madjid Abd Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011).

[7] https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23694/tentang-kota-padang.html, Sumbarpadang, "Tentang kota padang", diakses pada 28 mei 2023.

dapat dianggap sebagai wilayah pedesaan, sesuai dengan ciri umum desa-desa yang umumnya ditemukan di Provinsi Sumatera Barat.[8]

Dari total 193 kelurahan yang terdapat di berbagai bagian Kota Padang, baik yang terletak di pusat kota maupun yang berada di periferi kota, masih dapat dikategorikan sebagai kelurahan dengan tingkat perkembangan relatif rendah. Tidak hanya kondisi fisik lingkungan, melainkan juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memengaruhi situasi perkampungan.

Perubahan struktur geografisnya pada abad ke-20 dipengaruhi perencanaan pemerintah Hindia Belanda untuk menyusun tata letak dan organisasi perkotaan, sambil mengatur fungsi inti kota. Setelah meraih kemerdekaan, perkembangan perkotaan cenderung mempertahankan struktur yang terfragmentasi dengan menerapkan prinsip perencanaan kota yang seragam dan bersifat sentralistik. Salah satu aspek yang membedakan dan menjadi kebanggaan kota ini adalah keberadaan rumah gadang sebagai simbol identitas kota ini.[9]

B. Perkembangan Kota Padang

1. Masa awal (sebelum abad ke-17)

Asal mula terbentuknya nama Padang belum dapat dipastikan dengan pasti, namun diperkirakan bahwa kota ini dinamai Padang karena wilayahnya yang luas seperti tanah lapang. Dalam abad ke-14 (antara 1340 hingga 1375), Kota Padang berlokasi di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang dikuasai oleh Adityawarman dan terletak di bagian Minangkabau. Pada masa itu, Padang merupakan kampung nelayan yang dikenal dengan Kampung Batung. Administrasi kampung ini diawasi oleh Penghulu Delapan Suku yang menerapkan sistem pemerintahan nagari untuk mengelolanya. Pada era ini, lokasi pemukiman terletak di bagian selatan Sungai Batang Arau, terutama di wilayah yang saat ini disebut Seberang Padang. Dari sini masyarakat mengalami perkembangan dan melakukan reproduksi. Sebagian dari mereka memilih bermigrasi ke arah utara mendirikan kampung-kampung baru yaitu Alang Laweh, Ranah, Parak Gadang, dan Ganting.

Pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Iskandar Muda melakukan perluasan kekuasaan dan jaringan perdagangannya sehingga mencakup pesisir Pantai Barat Minangkabau. Proses ini melibatkan wilayah Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Proses ini berlangsung hingga akhir abad ke-17.

Setelah VOC menggantikan Kesultanan Aceh pada pertengahan abad ke-17, kaum bangsawan di Kota Padang berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai "raja-raja kecil" yang menjalin kemitraan dengan VOC. Hingga memasuki abad ke-19, sekitar 24 anggota kelompok bangsawan diangkat oleh Belanda sebagai "panglima," sebagaimana dikabarkan dalam koran lokal, Nieuw Padangsch Handelsblad, pada 23 Mei 1891. Para bangsawan ini memiliki kendali atas berbagai sumber daya ekonomi yang sangat strategis terutama sektor perdagangan, dan berfungsi sebagai pegawai atau perwakilan bagi pemerintahan Belanda.[10]

2. Era Kolonial (abad ke-17 hingga 19)

Perkembangan Kota Padang dimulai sejak era VOC. Runtuhnya Kerajaan Pagaruyung secara simbolis ditandai oleh penandatanganan perjanjian antara komunitas adat dan pemerintah Belanda akibat konflik Padri. VOC mengimplementasikan strategi politik divide et impera dengan tujuan memperluas wilayah perdagangan dan dominasinya. Proses ini menjadi poin awal yang menciptakan dinamika pengaruh asing di wilayah tersebut. Dampak strategi ini adalah munculnya ketegangan masyarakat di berbagai kota pesisir pantai Sumatera.

Selain itu, VOC melakukan propaganda yang mencitrakan Kesultanan Aceh akan menguasai Padang. VOC memberikan justifikasi bahwa mereka memberikan bantuan kepada masyarakat

[8] Marnis Nawi, *Perkampungan Diperkotaan Sebagai Pola Adaptasi Sosial, Kehidupan Di Perkampungan Miskin Di Kota Padang* (Padang: IDKD Sumatera Barat, 1982).

[9] Direktori Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Daftar Monitoring, Tipologi Dan Klasifikasi Tingkat Pembangunan Desa (Padang, 1982).

[10] Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial*.

menghadapi Aceh. VOC menyadari pentingnya posisi strategis Padang. Akibatnya, mereka menetapkan kota ini sebagai fokus utama dalam kegiatan perdagangan dan administratif. Pulau Cingkuak dan Sungai Batang Arau dianggap sebagai alternatif yang lebih optimal sebagai lokasi pelabuhan. Melalui perantara seorang kepala suku terkemuka di Padang, Orang Kayo Kaciak, VOC memperoleh persetujuan untuk mendirikan pusat kegiatan perdagangan di Kota Padang pada tahun 1667. Inilah awal perkembangan Kota Padang sebagai sebuah pusat perkotaan, yang tidak hanya memiliki peran penting sebagai pelabuhan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan. Sebagai bagian dari fasilitas pendukung, berbagai gudang besar mulai dibangun untuk memfasilitasi penyimpanan berbagai jenis barang. Kegiatan perdagangan yang semakin berkembang membuat pelabuhan Muara Padang menjadi sangat ramai. Wilayah ini tumbuh menjadi pusat pemukiman yang penuh aktivitas. Maka terbentuklah kesan bahwa Padang relatif makmur dan canggih yang ditandai oleh berbagai aktivitas bisnis dan politik. Laporan dari sumber-sumber Belanda masa itu cenderung menyampaikan pandangan serupa. Sebagai contoh, dalam catatan seorang pelancong Belanda yang mengunjungi Padang tahun 1922, kota ini digambarakan sebagai berikut: de stud van het heimwee naar de toekomst" (kota impian masa depan).[11]

Setelah memperluas jangkauan perdagangan, VOC memperluas dominasi pemerintahan dan kegiatan perdagangan dari Muara Padang ke seluruh bagian tengah Pulau Sumatera. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan penduduk setempat, yang merasa bahwa Belanda tidak hanya bertindak sebagai pedagang, tetapi juga telah menjajah wilayahnya. Penduduk mulai menunjukkan resistensinya dan mencapai puncak pada 7 Agustus 1669, ketika warga di Pauh dan Koto Tangah berhasil merebut kontrol bangunan yang dikuasai oleh Belanda di Muara. Insiden ini mengakibatkan sejumlah besar korban jiwa di pihak Belanda. Peristiwa ini diabadikan sebagai momen bersejarah yang menjadi awal terbentuknya Kota Padang. Setiap tahun dirayakan sebagai hari jadi kota tersebut.[12]

Peran Kota Padang sebagai pelabuhan distribusi hasil-hasil bumi dari pedalaman Minangkabau terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan menjalin berbagai perjanjian dagang dengan penguasa Minangkabau, Belanda berhasil memperoleh keuntungan yang besar dari dominasi perdagangan ini. Mulai tahun 1770, catatan-catatan menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah yang cukup besar dalam perdagangan ini, yakni sekitar 0,3 miliar pikul lada dan 0,2 miliar gulden emas dikirimkan setiap tahun melalui Pelabuhan Muara. Dengan adanya berbagai perubahan yang dilakukan oleh Belanda, transformasi Kota Padang dari desa besar (big village) ke dalam sebuah kota yang ramai dengan aktivitas komersial dan administrasi menjadi fenomena yang lebih dominan pada abad ke-20. Pada abad ke-19, Padang hanya desa besar dengan populasi berbagai suku. Pada 1819 jumlah penduduknya sekitar 8.500 jiwa.[13]

3. Masa kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abu Bakar Jaar terpilih sebagai kepala pemerintahan di Kota Padang. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Tengah Nomor 65/GP-50, yang dikeluarkan pada 15 Agustus 1950, menetapkan Kota Padang sebagai entitas otonom sementara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 225 tahun 1948. Pada periode tersebut, Kota Padang mengalami perluasan wilayah dengan penghapusan kewedanaan Padang dan perpindahan tanggung jawab ke tangan Walikota Padang.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/g/PD/1958, pada 29 Mei 1958, mengumumkan bahwa Kota Padang secara resmi dijadikan pusat administrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Transisi ini tercermin dalam perubahan isi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kotamadya Padang diakui sebagai sebuah wilayah otonom dengan administrasi dikelola oleh seorang Walikota.

---

[11] Prada Harahap, *Dari Pantai Ke Pantai, Perdjalanan Ke Soematra* (Weltevreden: Ultgevers Maatschapij, 1926).

[12] Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, 326 Tahun Padang Kota Tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: Gerbang Pariwisata Indonesia Kawasan Barat (PT. Buana Lestari, 1995).

[13] Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu* (Jakarta: Yasaguna, 1988).

Pada awalnya, wilayah Kota Padang memiliki luas sekitar 33 km^2. Wilayah ini terdiri dari tiga kecamatan dan 13 kampung yang meliputi daerah Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, dan Padang Timur. Namun, melalui implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, yang secara resmi diumumkan pada 21 Maret 1980, terjadi perluasan wilayah Kota Padang hingga mencapai 694,96 km^2. Dalam perluasan ini, wilayah tersebut dibagi menjadi 11 kecamatan dan 193 kelurahan.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada 1 Januari 2001, terlihat perubahan struktur administratif di Kota Padang yang saat ini mencakup 11 kecamatan dan 103 kelurahan. Kemudian, melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pembentukan organisasi kelurahan, jumlah kelurahan di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan menjadi 104 kelurahan.[14]

C. Faktor Dominan Pembentuk Kota Padang

Pembentukan Kota Padang dipengaruhi tiga faktor dominan yaitu topografi, kekuasaan, dan jaringan jalan. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Topografi

Karakteristik topografi Kota Padang bervariasi mencakup daerah dengan topografi datar terutama bagian utara diarahkan untuk pembangunan perumahan. Interpretasi citra menyoroti ada perubahan signifikan dalam pola penggunaan lahan, terutama di wilayah utara yang memiliki kelas lereng datar sekitar 0-2 persen. Perubahan serupa dalam pola penggunaan lahan juga tampak di sebelah timur Kota Padang di mana topografinya sedikit bergelombang dengan kemiringan 2.20 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa evolusi Kota Padang pada 1998–2008 menunjukkan kecenderungan untuk mengembangkan wilayah dengan topografi yang cenderung lebih datar.

Keadaan topografi suatu wilayah turut menentukan potensi risiko banjir jika wilayah tersebut dipilih sebagai tempat tinggal warga, kecuali jika penerapan teknologi dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satu upaya yang diambil pemerintah Kota Padang untuk mengurangi risiko banjir adalah perbaikan dan peningkatan pada sistem drainase kota. Peningkatan ini menitikberatkan pada pencegahan dan pengendalian banjir yang terjadi setiap tahun.[15]

2. Kekuasaan

Hasil pengamatan dan analisis dokumen perencanaan tata ruang Kota Padang tahun 2003 menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan beragam kebijakan untuk mengarahkan pertumbuhan kota. Salah satu tindakan konkretnya adalah peningkatan mutu infrastruktur jalan, terlibat dalam proyek pelebaran serta pengaspalan di bagian utara dan timur kota. Dapat disampaikan bahwa transformasi fisik Kota Padang mencerminkan hasil implementasi kebijakan pemerintah, khususnya bidang pengembangan infrastruktur, yang sejalan dengan rencana tata ruang yang telah dirancang. Langkah ini dimaksudkan menjamin optimalitas pemanfaatan setiap wilayah kota dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kota Padang, sebagai sebuah kota metropolitan, memiliki sejumlah besar potensi baik segi sosial da ekonomi maupun kebudayaan yang dapat dikembangkan menjadi industri ekonomi kreatif. Oleh karena itu perlu identifikasi dan pemanfaatan optimal terhadap potensi ekonomi kreatif tersebut. Pemerintah Kota Padang secara aktif berusaha meningkatkan jumlah pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif melalui kegiatan pembinaan dan promosi dengan tujuan agar pertumbuhannya berlangsung secara berkelanjutan. Faktor dominasi kekuasaan juga memiliki

[14] Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatra Barat Tahun 1950-An* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

[15] Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota Pada Abad Ke-20 Dan Pengunaan Ruang Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2006).

dampak signifikan pada aktivitas pengembang, yang pada dasarnya merupakan entitas yang ikut serta dalam membentuk arah perkembangan yang termanifestasikan di Kota Padang.[16]

3. Jaringan Jalan

Sebagai komponen integral dalam proses pengembangan struktur perkotaan, hubungan antara pemanfaatan lahan dan sistem jaringan jalan sangatlah erat dan saling terkait secara signifikan, yang tercermin dalam perkembangan fisik kota. Jaringan jalan tidak hanya menjadi koridor di mana pertumbuhan kota berlangsung, melainkan juga memberikan dampak signifikan terhadap perencanaan dan fungsi elemen-elemen struktural kota. Pada tahun 1950 Propinsi Sumatera Tengah telah memiliki lebih dari 4.000 kilometer jalan raya yang dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat, membuatnya menjadi kota yang inklusif dan bervariasi, karena jaringan jalan tersebut membuka akses ke berbagai daerah pedalaman dan terus berkembang.

Meskipun demikian, peningkatan jaringan jalan di Kota Padang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada periode tahun 1998-2008. Meskipun demikian, tindakan untuk meningkatkan mutu jalan terus dilaksanakan secara khusus, kawasan di sebelah timur dan utara kota, termasuk sepanjang jalur Alai Timur, Ampang, hingga Bypass, sedang menjadi pusat perhatian dengan penekanan yang lebih spesifik. Fokus ini muncul sebagai respons terhadap tingginya kepadatan lalu lintas di wilayah timur kota.

Pertumbuhan Kota Padang cenderung mengikuti pola rute jalan yang telah ada, menjadikan aspek jaringan transportasi sebagai pusat perhatian utama, dan oleh karena itu, dapat diartikan bahwa distribusi pemukiman lebih cenderung berkembang di daerah yang memiliki aksesibilitas yang optimal.[17]

D. Hubungan dengan Daerah Pedalaman

Kota Padang terletak di sepanjang Pesisir Barat Pulau Sumatera. Sebagian besar wilayah kota ini berada pada ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Meskipun terletak di tepi pantai, daerah Kota Padang juga melibatkan garis pantai di Pulau Pisang, yang merupakan bagian integral dari wilayah administratif kota ini. Pada awal 1950-an, Kota Padang termasuk sebagai salah satu dari 16 daerah tingkat II di Provinsi Sumatera Tengah dan memegang status sebagai Kotapraja yang dipimpin oleh Walikota.

Pada tahun 1958, ketika Provinsi Sumatera Tengah mengalami pemekaran, Kota Padang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat dan mendapatkan status sebagai Kotamadya. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi salah satu Daerah Tingkat II yang terletak di sepanjang tepi pantai atau memiliki wilayah pesisir. Dengan demikian, kota ini dan beberapa Daerah Tingkat II lainnya sering diakui sebagai daerah pesisir, yang dapat dibedakan dari daerah pedalaman atau darek.

Penggunaan istilah daerah pesisir dan darek terkait erat dengan dimensi sosiologis yang merujuk pada sejarah kerajaan Minangkabau. Konsep ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai hubungan Kota Padang dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun istilah pedalaman pada dasarnya mengacu pada daerah yang terletak di bagian dalam geografis Sumatera Barat, dalam konteks ini, istilah tersebut juga mencakup sejumlah wilayah di sekitar kota yang tetap berdekatan.

Walaupun begitu, Kota Padang tidak pernah terasing dari wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah pedalaman. Sejak masa prakolonial, kota ini telah menjadi tempat yang kerap dijadikan tujuan oleh para pedagang dari wilayah pedalaman, terutama setelah dibukanya jalur jalan raya dan rel kereta api yang menghubungkan Padang dengan berbagai kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Peranan Kota Padang mengalami perkembangan pesat pada awal abad ke-20, menjadikannya

[16] Marnis Nawi, *Perkampungan Diperkotaan Sebagai Pola Adaptasi Sosial, Kehidupan Di Perkampungan Miskin Di Kota Padang*.

[17] Kementerian Penerangan, (Jakarta: Provinsi Sumatera Tengah, 1950).

sebagai pusat kegiatan politik, ibukota Sumatera, pusat pendidikan, perdagangan, serta pusat ekonomi yang lainnya.[18]

E. Perkembangan Urbanisasi

Pada permulaannya, pertumbuhan Kota Padang mengikuti Sungai Batang Arau sebagai batas alami antara wilayah perkotaan dan hutan. Perubahan secara fisik di kota ini dapat dengan jelas terlihat melalui evolusi penggunaan lahan, yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi, menyebabkan peningkatan pemberian lahan untuk pemukiman dan perluasan wilayah urban. Meskipun demikian, perluasan Kota Padang tidak mengikuti pola lingkaran konsentrik, melainkan merentang ke arah utara.

Pusat perkotaan juga mengalami pergeseran dari Sungai Batang Arau ke arah utara, dikarenakan beberapa perusahaan jasa dan pemerintah cenderung memilih lokasi yang lebih sentral dan dekat dengan konsumen mereka. Seiring berlangsungnya perpindahan ini, Beberapa aktivitas yang sebelumnya terpusat di wilayah pusat kota yang sudah lama, turut bertransisi ke sebelah utara karena fasilitas pendukungnya juga melakukan perpindahan menuju ke arah tersebut. Perluasan ke utara dan mendekati timur dianggap sebagai opsi paling layak, mengingat terbatasnya wilayah Kota Padang di sebelah barat dan selatan oleh Gunung Padang serta Samudera Hindia.

Selama periode kolonial, benteng VOC memiliki peran sentral dalam perkembangan kota, dan jejaknya masih dapat diidentifikasi hingga hari ini sebagai titik nol. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Padang sebagai pusat administratif untuk wilayah Pesisir Barat Sumatra, yang mencakup wilayah Sumatra Barat dan Tapanuli yang kita kenal sekarang. Transformasi spasial Kota Padang pada periode sebelum abad ke-20 mencerminkan keterkaitan yang kompleks antara penetrasi kolonial dan perlawanan yang berasal dari tingkat lokal. Morfologi kota mencakup sistem pertahanan kota, jaringan kanal, pemukiman dengan keberagaman etnis, dan pola sirkulasi organik.

Pada abad ke-20, transformasi wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh campur tangan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Upayanya adalah untuk mengatur pola dan struktur kota, sambil mengelola fungsi inti yang telah ada di dalam kota tersebut. Pasca-kemerdekaan, kemajuan perkotaan tetap mempertahankan bentuk yang terfragmentasi, dengan terus berlanjutnya dualitas karakter kota dan dominasi konsep perencanaan kota yang seragam serta bersifat sentralistik. Oleh karena itu, morfologi ruang kota Padang saat ini masih mencerminkan dampak dari perkembangan masa lalu.[19]

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang meliputi suatu wilayah yang memiliki luas mencapai 694,96 km^2. Lebih dari 60% dari total luas wilayah ini, kira-kira ±434,63 km^2, terdiri dari daerah perbukitan yang dilindungi oleh hutan, dengan ketinggian mencapai 1.853 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, bagian sisanya dari wilayah Kota Padang berfungsi sebagai daerah perkotaan yang efektif. Jumlah penduduk kota ini mencapai 871.534 orang, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat etnis Minangkabau yang mayoritas menganut agama Islam.

Ciri khas ruang perkotaan Kota Padang dapat ditemui sepanjang pesisir Samudera Hindia, dengan latar Pegunungan Bukit Barisan yang melingkupinya. Perluasan wilayah perkotaan di Kota Padang secara berangsur-angsur telah menjadi kebijakan yang dijalankan, terutama menelusuri arah ke utara dan timur dari pusat kota tua yang terletak di muara Sungai Batang Arau. Sejak tahun 1995, Pemerintah Kota Padang secara proaktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mengembangkan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai strategi guna meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta menyediakan fasilitas rekreasi yang bermanfaat bagi warganya.

Sebagai pusat ekonomi dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling tinggi di wilayah Sumatera Barat, Kota Padang menunjukkan ciri-ciri kota tua yang berlokasi dekat dengan benteng

[18] Mardanis, *Sejarah Kota Padang.*

[19] Freek Colombijn, *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005).

dan gudang-gudang yang dahulu dimiliki oleh Kompeni Belanda, sekaligus permukiman para Para pedagang dari India dan Cina berkecimpung di dalamnya. Pada abad ke-18, kota ini secara resmi memperoleh pengakuan status sebagai kota yang mandiri. Daerah kota tua kebanyakan ditempati oleh komunitas etnis Cina. Jalan Batang Arau, yang sebelumnya berfungsi sebagai promenade dan pelabuhan, kini dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah dari masa pemerintahan Belanda, banyak di antaranya diubah menjadi gudang atau tempat penyimpanan.

Bangunan-bangunan peninggalan Belanda dapat dijumpai sepanjang jalan Batang Arau yang mengarah ke muara, Sejumlah besar bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai kantor dan gudang untuk perusahaan Eropa, gedung-gedung pemerintahan kolonial, lembaga perbankan, dan berbagai fasilitas perkantoran lainnya, menjadikan kota ini sebagai pusat berbagai kegiatan. Di sepanjang tepi sungai yang berlawanan, tersebar rumah-rumah kayu bergaya Melayu yang berdiri di atas tiang, berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi penduduk setempat. Pada tahun 1833, sekelompok warga Klingaleezen dan Sipahis dari India tiba di Padang, menambah keberagaman budaya dan interaksi sosial di wilayah tersebut. Dengan tujuan untuk bekerja di sebuah perkebunan. Mereka telah mengakulturasi diri dengan adat istiadat setempat, terutama dari masyarakat Melayu dan Minangkabau. Gaya arsitektur masjid di sebelah barat jalan Batipuh mencerminkan pengaruh dari Arabia dan India, dan dikenal sebagai bangunan masjid yang usianya paling tua di Kota Padang.[20]

Kota Padang dikenal luas karena menjadi tempat berdirinya rumah gadang, yang merupakan salah satu jenis rumah adat yang khas dan sumber kebanggaan kota ini. Sayangnya, saat ini banyak rumah gadang yang terbengkalai dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Jumlah rumah gadang yang masih terjaga dan memiliki penampilan megah sangatlah terbatas, bahkan dapat dihitung dengan menggunakan jari. Ini merupakan perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan masa lalu, ketika rumah gadang yang indah dapat ditemukan di setiap sudut perkampungan. Saat ini, Sebagian besar masyarakat percaya bahwa rumah gadang memiliki peran yang lebih signifikan sebagai lambang "keberhasilan ekonomi" bagi keluarga, suku, dan komunitas tertentu. Oleh karena itu, mereka yang memiliki situasi ekonomi yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam upaya membangun atau merawat rumah gadang. Di sisi lain, masyarakat di kampung halaman menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan.

Dari sudut pandang aktivitas ekonomi, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kota. Dengan definisi yang lebih sederhana, pasar dapat dijelaskan sebagai lokasi di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi. Pasar menjadi tempat di mana berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, sandang, hingga barang-barang kebutuhan lainnya, dapat diperoleh. Dinamika peredaran barang di pasar mencerminkan proses perdagangan, yang pada akhirnya menjadi fenomena yang kontributif terhadap peningkatan pendapatan ekonomi kota.[21] Berikut pembangunan pasar yang dilakukan:

1) Pasar Raya

Demi menjamin kelancaran aktivitas ekonomi melalui pasar, diperlukan serangkaian langkah-langkah untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas ekonomi pasar. Dalam kerangka ini, pemerintah Kota Padang secara progresif berusaha meningkatkan penyediaan fasilitas pasar. Selama periode antara tahun 1950 dan 1979, terlihat adanya berbagai inisiatif dalam pengembangan fasilitas ekonomi tersebut.

Pada tahun 1950, sarana pasar di Kota Padang terutama terdiri dari bangunan-bangunan los kayu dengan atap seng. Setiap los secara khusus diarahkan untuk menyediakan berbagai jenis barang, seperti kain, ikan, sayur, dan lainnya. Namun, sejalan dengan berlalunya waktu, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Bangunan-bangunan los tersebut akhirnya dibongkar dan digantikan oleh petak-petak kios. Pada era los-los, pedagang tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan stok barang dagangnya di dalam pasar, dan perubahan ini mencerminkan perkembangan dalam penyediaan fasilitas pusat perbelanjaan.

---

[20] Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial.*

[21] Afrizal, *Pedagang Sayuran Dari Daerah Pinggiran Kota Padang* (Padang: Jurusan Sosiologi Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, 1986).

Pada tahun 1955, terjadi insiden kebakaran yang melanda dan mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan petak-petak kios pasar di Kota Padang. Kejadian kebakaran tersebut memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap aktivitas perekonomian di pasar, dan dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah kota mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang sesuai. Upaya tersebut mencakup proyek pembangunan fasilitas pasar yang bersifat permanen.

Rentang waktu dari tahun 1959 hingga 1978 menunjukkan adanya perkembangan dalam penyediaan fasilitas pasar. Pembangunan Pasar Bertingkat Fase 1 dilaksanakan pada tahun 1959. Pada 1962, tahap pembangunan Pasar Bertingkat Fase II diimplementasikan. Pelaksanaan pembangunan Pasar Bertingkat Fase III berlangsung pada tahun 1964. Pasar Bertingkat Fase IV dirancang dan dibangun pada tahun 1971. Tahap pembangunan Pasar Bertingkat Fase V dilaksanakan pada tahun 1972. Pasar Bertingkat Blok A dikonstruksi pada tahun 1973. Pelaksanaan pembangunan Pasar Bertingkat Fase VI dilakukan pada tahun 1974. Pasar Bertingkat Fase VII dirancang dan dibangun pada tahun 1976. Pembangunan Pasar Raya Tiur Blok I dijalankan pada tahun 1978. Perkotoan Rajawali dikembangkan dan dibangun pada tahun 1973.

2) Pasar Pembantu

Pelaksanaan pembangunan Pasar Simpang Haru dilakukan pada tahun 1973. Pada tahun 1974, Pasar Ulak Karang dirancang dan dibangun. Pasar Tanah Kongsi dikembangkan dan dibangun pada tahun 1976. Pelaksanaan pembangunan Pasar Alai dijalankan pada tahun 1974.

Keberadaan fasilitas pasar yang cukup di dalam kota menjadi salah satu dorongan yang mengakibatkan pertumbuhan dalam jumlah penyimpanan barang yang didistribusikan. Kondisi fasilitas pasar yang memadai mampu sejajar dengan arus barang yang masuk dari wilayah lain, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat perkotaan yang terus berkembang.[22]

Guna memastikan berlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah kota diwajibkan memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan sekaligus peningkatan kualitas jaringan jalan. Tindakan ini menjadi sangat penting karena jalan-jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi. Selain itu, jalur transportasi ini juga menjadi sarana yang sangat dibutuhkan oleh penduduk kota untuk memudahkan interaksi dan komunikasi antar sesama warganya. Proses inventarisasi jalan di Kota Padang pertama kali dimulai oleh Tim Perencana Pembangunan Daerah (TEPPEDA) Kota Madya Padang pada periode tahun 1973/1974. Hasil dari kegiatan inventarisasi tersebut, yang dilaksanakan pada tahun 1973/1974, mencatatkan bahwa total panjang jalan di Kota Padang adalah sekitar 174,2 kilometer, di mana 73,1 kilometer di antaranya merupakan jalan aspal, 36,6 kilometer berupa jalan kerikil, dan sisa-sisanya masih berupa jalan tanah.

Beberapa tahun berikutnya terdapat peningkatan pertumbuhan panjang jalan. Pada tahun 1979 panjang jalan aspal 252,01 kilometer, jalan kerikil memiliki panjang sekitar 183,80 kilometer, dan jalan tanah memiliki panjang sekitar 184,39 kilometer. Informasi ini mencerminkan tingginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap pengembangan infrastruktur jalan di Kota Padang. Di samping itu, terlihat semangat pengabdian masyarakat melalui kegiatan gotong-royong, yang berkontribusi dalam membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kualitas jaringan jalan.[23]

Kesimpulan

Evolusi sejarah Kota Padang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode yaitu sebelum abad ke-17, era kolonial (abad ke-17 hingga abad ke-19), dan awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada abad ke-20, kemajuan Kota Padang tampak pada dua aspek yaitu tata pemerintahan, pertumbuhan penduduk, dan evolusi fasilitas perkotaan. Pada awalnya Kota Padang mengikuti arah Sungai Batang Arau, yang berfungsi sebagai orientasi geografis perkembangan kota sebagai batas antara

[22] Sugiyanto, *Tinjaun Menuju Strategi Pembangunan Perkotaan,* (Jakarta: Prisma, 1976).
[23] Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, *Pertambahan Jalan Di Kota Padang* (Padang, 1985).

pemukiman dan hutan. Perubahan dalam struktur fisik kota tercermin melalui pemanfaatan lahan, di mana pertumbuhan populasi yang terus berkembang menghasilkan peningkatan alokasi lahan untuk pemukiman serta perluasan area perkotaan. Perluasan Kota Padang tidak mengadopsi bentuk yang melingkari wilayah tersebut, tetapi cenderung memanjang mengarah ke utara.

Faktor-faktor yang dominan dalam membentuk Kota Padang melibatkan topografi, struktur kekuasaan, dan jaringan jalan. Pertumbuhan kota ini juga erat terkait dengan koneksi dan interaksi dengan daerah pedalaman, dan proses urbanisasi Kota Padang mencerminkan evolusi baik dari segi ruang fisik maupun aspek non-fisiknya. Karakteristik Kota Padang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, mencakup keberadaan rumah gadang sebagai elemen khas, kehadiran pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perubahan struktur perkotaan sepanjang waktu. Guna menjamin kelancaran aktivitas perekonomian, pemerintah kota meningkatkan fasilitas ekonomi pasar. Upaya ini terlihat jelas dalam rentang waktu antara tahun 1950 hingga 1979, di mana pemerintah berfokus pada pengembangan fasilitas ekonomi pasar secara berkelanjutan. Pada akhirnya, dalam konteks sejarah dan geografi, Kota Padang memegang peran yang sangat penting sebagai pusat perdagangan, pusat administrasi, dan pusat hubungan dengan wilayah sekitarnya. Hal ini menciptakan identitas yang bersifat unik dan bervariasi bagi kota tersebut.

Daftar Acuan

Abd Rahman Hamid, Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Afrizal. *Pedagang Sayuran Dari Daerah Pinggiran Kota Padang*. Padang: Jurusan Sosiologi Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, 1986.

Amandos Jong Tallo. Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen Di Kota Malang)Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen Di Kota Malang).” *Perencanaan Wilayah Dan Kota* Vol.25 (2014): 213–27.

Asnan, Gusti. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatra Barat Tahun 1950-An*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Colombijn, Freek. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota Pada Abad Ke-20 Dan Pengunaan Ruang Kota.* Yogyakarta: Ombak, 2006.

———. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2005.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. *Pertambahan Jalan Di Kota Padang*. Padang, 1985.

Direktori Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat. Daftar Monitoring, Tipologi Dan Klasifikasi Tingkat Pembangunan Desa. Padang, 1982.

http://ekoalvaresz.blogspot.com/2008_06_01_archive.html,diakses pada 28 Oktober 2023.

https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23694/tentang-kota padang. html, Sumbarpadang, “Tentang kota padang”, di akses pada 28 mei 2023.

Kementerian Penerangan. Jakarta: Provinsi Sumatera Tengah, 1950.

Lamahoda. *Morfologi Kawasan Kota Lama Kupang*. Tesis. Tesis: Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2019.

Mardanis. *Sejarah Kota Padang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987.

Marnis Nawi. *Perkampungan Diperkotaan Sebagai Pola Adaptasi Sosial, Kehidupan Di Perkampungan Miskin Di Kota Padang*. Padang: IDKD Sumatera Barat, 1982.

Mestika Zed. *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial*. Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2009.

Pemda Tingkat II Kotamadya Padang. 326 Tahun Padang Kota Tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: Gerbang Pariwisata Indonesia Kawasan Barat. PT. Buana Lestari, 1995.

Prada Harahap. *Dari Pantai Ke Pantai, Perdjalanan Ke Soematra*. Weltevreden: Ultgevers Maatschapij, 1926.

Rusli Amran. *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: C.V. Yasaguna, 1988.

Sugiyanto. *Tinjaun Menuju Strategi Pembangunan Perkotaan*. Jakarta: Prisma, 1976..